

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2019
(Studi Pada Pelayanan Air Minum/Baku Di Kelurahan Kampung Bugis)**

Agung Harsa¹, Kustiawan², Yudhanto³
agungharsa.ah@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

The City Without Slums Program is a national program that aims to improve public access to infrastructure and basic services in urban slums to create livable, productive and sustainable urban settlements. In accelerating the handling of slum areas, supporting the 100-0-100 movement in urban areas, namely 100 percent access to drinking water, 0 percent slum areas and 100 percent sanitation. In the middle of 2016 in Indonesia, especially in the city of Tanjungpinang, one of the programs from the Ministry of Public Works and Public Housing was issued through the Director General of Human Settlements No. 40/SE/DC/2016 concerning General Guidelines for the City Without Slums Program. The activities carried out by the city government, especially the Public Works and Public Housing (PUPR) department in the field of Cipta Karya in the case study of researchers related to drinking/raw water services in the Bugis village, Tanjungpinang city government, especially the PUPR service in the Cipta Karya field. has built boreholes, and installed water pipes to the houses of the people in the coastal settlements of Kampung Bugis. In the village of Kampung Bugis, there are 2 drilled wells that have been built, which are a source of water for the Bugis village community, especially coastal communities, but the cubic water source is very small to flow to people's homes on the coast, because the community is still complained about water problems at the location. Some people have received pipe installation facilities from the PUPR Service, but the water cannot flow to community houses on the coast of Kampung Bugis. The purpose of this study is to determine the implementation of KOTAKU with drinking water problems in the Bugis Village, Tanjungpinang City by using the Van Metter and Van Horn theories. The research method used is a qualitative descriptive method with 10 informants, and uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study found that currently the implementation has been running, but not yet optimal, the solution provided from the relevant parties is the Technical Implementation Unit of the Service (UPTD) under the auspices of the PUPR service in the field of Cipta Karya, namely by diverting the flow of SPAM Kampung Bugis to Sungai Ladi SPAM.

Keywords: Implementation, KOTAKU Program, Clean Water Service.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, dengan bertambahnya populasi pertumbuhan yang *signifikan* setiap tahunnya maka ketersediaan lahan permukiman pun bertambah padat juga, akibatnya banyak permukiman-permukiman yang tidak beraturan dimana fasilitas yang tersedia tidak layak untuk digunakan, seperti akses air bersih tidak ada sehingga masyarakat yang tinggal disana sering menggunakan air kotor untuk aktivitas sehari-harinya.

Penyediaan air bersih, dan air minum/baku untuk masyarakat di Indonesia khususnya di kawasan perkotaan kumuh, masih di hadapkan dengan beberapa persoalan yang begitu kompleks, dan sampai saat ini belum dapat teratasai sepenuhnya, salah satunya yang di hadapi di kawasan kumuh perkotaan. Akses air bersih tidak ada sehingga masyarakat yang tinggal sering menggunakan air kotor untuk aktivitas sehari-hari.

Salah satu langkah pemerintah pusat untuk mewujudkan sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu menjadikan kota tanpa kumuh di perkotaan tahun 2019 dengan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kotaku adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Berdasarkan Permen ini, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan penanganan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mengatasi semakin bertambahnya permukiman kumuh di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2016 di Indonesia khususnya di kota Tanjungpinang di rencanakan lah salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Adapun manfaat dari program tersebut diantaranya untuk Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman perkotaan di kawasan kumuh, adapun tujuan dari program ini yaitu :

- a. memperbaiki drainase yang tersumbat ,
- b. pelayanan air minum/baku
- c. pengelolaan persampahan,
- d. pengelolaan air limbah,
- e. Melakukan pengamanan kebakaran, dan
- f. ruang terbuka hijau.

Guna memfokuskan wilayah sasaran yang termasuk dalam kawasan permukiman kumuh maka pemerintah melalui walikota mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 tentang Penetapan lokasi lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang dengan memutuskan daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan Program Kotaku antara lain sebagai berikut :

Tabel 1
Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kota Tanjungpinang
Tahun 2019

No	Lokasi	Luas (Ha)	Kaeterangan
1	Pantai impian, kelurahan kampung bugis	12,6 (Ha)	
2	Lembah purnama, kelurahan tanjung ayun sakti	5,99 (Ha)	
3	Sungai nibung angus, kelurahan tanjungpinang timur	14,6 (Ha)	
4	Kelurahan Tanjung unggat	31,64 (Ha)	
5	Pelantar Sulawesi	51,85 (Ha)	
6	Kampung bugis, kelurahan kampung bugis	18,92 (Ha)	
7	Senggarang, kelurahan senggarang	14,81 (Ha)	
Total		150,41 (Ha)	

Sumber : SK Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.

Dalam hal ini peneliti memilih meneliti di Kampung Bugis di karenakan program KOTAKU tersebut masih di lakukan di kelurahan Kampung Bugis, hal ini di dasari dari data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Peantaaan Ruang Kota Tanjungpinang (Bidang Cipta Karya) dalam program KOTAKU Kota Tanjungpinang Berdasarkan data yang di peroleh dari dinas pekerjaan umum, dan penataan ruang kota Tanjungpinang terkait program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan Kampung Bugis terdapat indikator-indikator, persentase, dan parameter dari program tersebut. Untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang terjadi dari kawasan kumuh di kelurahan Kampung Bugis tersebut, berikut Tabel indikator-indikator program KOTAKU di Kelurahan Kampung Bugis sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator-Indikator Beserta Parameter Program KOTAKU di
Kelurahan Kampung Bugis

NO	KRITERIA/INDIKATOR	%	PARAMETER
1	Keteraturan bangunan	41%	Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan Kepadatan bangunan Kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah (17,9 unit/ha).
	Kelayakan fisik bangunan	25%	Ketidaksesuaaian dengan persyaratan teknis bangunan
2	Aksesibilitas Lingkungan Memadai	33%	Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungann yang belum memadai
		29%	Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas yang masih buruk
3	Pelayanan air minum/baku	14%	Ketersediaan akses aman air minum yang belum terlayani
		100%	Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air, masyarakat membutuhkan minimal 60 liter/orang/hari (mandi, minum, cuci)

4	Drainase lingkungan	8%	Ketidakkampuan mengalirkan limpasan air
		19%	Ketidak tersediaan drainase
		5%	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan
		11%	Tidak terpeliharanya drainase
		2%	Kualitas konstruksi drainase yang belum sesuai standar teknis
5	Pengelolaan air limbah	59%	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		59%	Sapas pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6	Pengelolaan persampahan	93%	Sapas persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		31%	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		93%	Tidak terpeliharanya sapas pengelolaan persampahan
7	Pengamanan bahaya kebakaran	61%	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran
		99%	Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: Dinas Pekerjaam Umum dan Peantaaan Ruang Kota Tanjungpinang (Bidang Cipta Karya) program KOTAKU Kota Tanjungpinang, 2015 s/d 2019

Dari indikator-indikator beserta parameternya program kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kampung Bugis di atas, dapat kita lihat masih banyak masalah masalah yang terjadi di lingkungan tersebut, di antaranya terdapat dua masalah yang menjadi permasalahan dasar dari program tersebut antaranya yaitu :

- a. masalah pelayanan air minum/baku yang persentasenya mencapai 100% dengan parameter masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari (mandi, minum, cuci),
- b. dan masalah yang kedua yaitu masalah pengamanan bahaya kebakaran yang persentasenya mencapai 99% dengan parameter ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran di lokasi tersebut. Masalah kedua tersebut sangat mendasar dalam program kota tanpa kumuh di perkotaan kota Tanjungpinang khususnya di Kelurahan Kampung Bugis.

Di karena kan dalam hal ini masalah pelayanan air minum/baku merupakan masalah kebutuhan pokok dalam lingkungan hidup masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, masalah ini merupakan masalah pokok bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan tidak menyangkut dengan perekonomian saja, namun air menjadi salah satunya dalam kesejahteraan masyarakat.

II. Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut *Lexy J. Moleong* (2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena jenis penelitian ini menggambarkan secara langsung fenomena yang sudah terjadi dan penelitian ini tidak memerlukan data angka yang diperhitungkan.

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data skunder dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Kordinator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 Orang
2	Kepala BLUD-UPTD SPAM Kota Tanjungpinang	1 Orang
3	Kasie Penyehatan Lingkungan (Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Tanjungpinang)	1 Orang
4	Kasie Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Kampung Bugis)	1 Orang

5	Ketua Divisi SPAM Kota Tanjungpinang/Operator Lapangan SPAM Kota Tanjungpinang (wilayah kampung Bugis,dan Sungai Ladi)	1 Orang
6	Masyarakat	5 Orang
Total		10 Orang

Sumber ; Di olah oleh peneliti

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU) Di Kota Tanjungpinang(studi pada Pelayanan Air Minum/Baku Di Kelurahan Kampung Bugis). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Skripsi pada tahun 2018 yang di tulis oleh Wita Dwi Anugrah Valentine yang berjudul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Pada Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2018) Sebagai tugas akhir skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa saat ini implementasi belum berjalan dengan maksimal, karena karena masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan aliran SPALD-T. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah standar dan sasaran kebijakan: belum semua rumah tangga terpenuhi; sumber daya: keterbatasannya pemahaman dan kemampuan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat); hubungan antar organisasi: sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal; kondisi sosial, ekonomi dan politik: adanya kecemburuan sosial, pemahaman masyarakat masih minim karena faktor pendidikan dan sulit dalam menyatukan pendapat/pemikiran antara anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
2. Penelitian skripsi yang telah di teliti oleh Indah Fitri Maulana pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi di dalam penelitiannya ini peneliti bertujuan untuk melihat perbandingan hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi. Perbandingan tersebut dilihat melalui teknik evaluasi hasil William N Dunn, model evaluasi Produk Daniel L. Suffelbeam, dan teori Evaluasi Proses Bingham dan Feblinger. Aspek tersebut yaitu Efektifitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, dan hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KOTAKU telah berhasil mengurangi wilayah kumuh di Kelurahan Nusukan dan Semanggi secara bertahap. Namun, dari hasil yang terlihat, program KOTAKU di Kelurahan Semanggi lebih efektif dibandingkan Kelurahan Nusukan. Hal ini dikarenakan Kelurahan Semanggi lebih variatif dalam memanfaatkan program KOTAKU dan dilaksanakan rutin secara bertahap setiap tahun.

3. Dari jurnal yang di tulis oleh Pentynia Ulfhasari tahun 2013 Mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjudul kebijakan pemerintah kelurahan Kampung Bugis dalam pelayanan air bersih di Kampung Bugis tahun 2016 (studi pada pelayanan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kampung Bugis). Dalam penelitiannya dia menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Kampung Bugis kota Tanjungpinang. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Kebijakan pemerintah kelurahan Kampung Bugis agar memberikan ketersediaan air bersih yang layak konsumsi untuk masyarakat selalu tersedia baik terlebih lagi musim kemarau. Adapun permasalahan yang timbul di masyarakat salah satunya tidak adanya mesin pompa air pendorong dari bak air bersih minimnya jumlah titik ledeng air bersih yang tidak merata sehingga membuat masyarakat mengantri dan rela mengambil air bersih yang jauh dari tempat tinggal mereka ke titik ledeng tersebut. Sehingga dari permasalahan ini perlu adanya pembenahan yang harus di lakukan oleh pihak kelurahan Kampung Bugis tersebut.

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada implementasi program kotaku pada pelayanan air minum/baku. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2016:72) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implemetasi, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan Disposisi Implementor.

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019(Studi pada pelayanan air minum/baku di kelurahan kampung Bugis).

Menurut Sutrisno (1991:1) air minum/baku merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain untuk di konsumsi air juga dapat di jadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan. Dalam implementasi program KOTAKU, khususnya pada permasalahan air minum/baku di kelurahan Kampung Bugis, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang (PUPR) khususnya di Bidang Cipta Karya memiliki peran dalam melakukan pembangunan sarana, dan prasarana dalam program KOTAKU tersebut.

Kemudian untuk pelayanan, dan permasalahan tekhnis, di kelola oleh BLUD-UPTD SPAM Kota Tanjungpinang yang menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Adapun kegiatan yang di lakukan pemerintah kota, khususnya dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang Cipta Karya dalam program Kota Tanpa Kumuh(KOTAKU) dengan studi kasus pelayanan air minum/baku di kelurahan Kampung Bugis, pemerintah kota Tanjungpinang, khususnya dinas PUPR di bidang Cipta Karya telah membangun Sumur bor, dan pemasangan pipa-pipa air ke rumah masyarakat yang berada di permukiman pesisir Kampung Bugis tersebut. Di kelurahan Kampung Bugis tersebut, ada 2 titik sumur bor yang telah di bangun, yang menjadi sumber air untuk masyarakat kampung Bugis, khususnya masyarakat pesisir, namun sumber air tersebut kubiknya sangat kecil untuk di aliri ke rumah masyarakat yang ada di pesisir, karna masyarakat masih mengeluh kesahkan permasalahan air di lokasi tersebut.

Dengan menganalisis permasalahan yang muncul perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ada, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian ini. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Kota Tanpa Kumuh deng masalah pelayanan air minum/baku ini di jalankan, maka peneliti menggunakan teori yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2016:72) yaitu:

a. Standar, dan sasaran kebijakan

Standar kebijakan mengacu pada aturan yang berlaku, Kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kotaku adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Berdasarkan Permen ini, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh agar lebih terarah dan jelas dalam melakukan kegiatan yang akan dicapai. Dalam program ini Pemerintah Pusat menargetkan 100% akses air minum dengan arti semua harus punya akses pelayanan air minum. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adapun sasaran program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang ada di kawasan pesisir khususnya kampung Bugis, yaitu untuk mensejahterkan masyarakat-masyarakat yang sulit atau belum terpenuhi atas air.

b. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya menjadi salah satu indikator yang menentukan keberhasilan implementasi. Sumber daya manusia mencakup staf dengan jumlah tepat dan dengan keahlian yang diperlukan. Sedangkan sumber daya non manusia mencakup anggaran dan peralatan/teknisnya. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak berjalan efektif dalam Pelayanan air minum/baku tersebut. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kapasitas ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metode). Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa jumlah petugas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya yang berada di Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) kelurahan Kampung Bugis kapasitas ketersediaan sudah optimal dan berkompoten serta terlatih di bidangnya karena sudah di bekali ilmu terkait di bidangnya.

Adapun Sumber daya anggaran dalam program ini merupakan anggaran dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk membantu mendanai program tersebut dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya sesuai dengan Prioritas Nasional. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, agar lebih terarah dan jelas dalam melakukan kegiatan yang akan dicapai. Adapun kisaran jumlah anggaran dalam program ini khususnya pembangunan proyek sumur bor berkisar Rp.2.000.000.000-Rp.4.000.000.000.

c. Hubungan antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam implementasi sangat diperlukan untuk menciptakan kerjasama dan hasil kebijakan yang diinginkan. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain. Tidak hanya pada satu instansi terkait akan tetapi juga berkerjasama dengan berbagai pihak-pihak lain untuk keberhasilan suatu program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini hubungan yang dilakukan antara pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR) di bidang Cipta Karya, dan BLUD-UPTD SPAM Kota Tanjungpinang. Pada segi pembangunan di kerjakan oleh bidang cipta karya, dan pada pengelolaan pelayanan nya di tugaskan kepada BLUD-UPTD SPAM Kota Tanjungpinang. berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2016 tentang uraian

tugas pokok, dan fungsi organisasi dan tata kerja dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan dan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, penyehatan lingkungan dan sumber daya air.

d. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Dalam pengimplementasian suatu program, karakter dari agen pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik keras, ketat dan tegas pada aturan, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. bahwasannya program KOTAKU ini di Kelurahan Kampung Bugis kawasan pesisir terkait dengan pelayanan air minum/baku tersebut belum dapat di katakan maksimal, karna dalam hal ini penerima manfaat, (masyarakat) menyampaikan opini yang berbeda dengan apa yang di sampaikan pihak instansi yang berkolaborasi tersebut, hal tersebut berbanding jauh dengan apa yang di rasakan masyarakat pesisir tersebut, mereka mengeluh kesahkan terkait dengan pelayanan air yang di berikan pemerintah tersebut.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial, adanya dukungan dari masyarakat sekitar untuk membantu pembangunan sistem penyediaan air minum/baku tersebut. Kondisi ekonomi yang baik dan mendukung dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kondisi politik, harus ada dukungan elit politik dikarenakan dukungan elit politik sangat berpengaruh saat program tersebut sedang berjalan.

Dalam hal ini masyarakat yang menggunakan jasa layanan air minum/baku berpengaruh penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut, namun pemerintah lebih berpengaruh lagi dalam membantu pengoperasian air minum/baku tersebut. Keduanya sama-sama berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini, karna tanpa masyarakat yang menggunakan jasa tersebut pemerintah daerah tidak akan mendapatkan penghasilan untuk menambah pemasukan kas suatu daerah, dan pemerintah pun tidak bisa tidak bisa melayani tanpa ada masyarakat.

Dalam masalah pelayanan air minum/baku tersebut, masyarakat wilayah pesisir Kampung Bugis mengeluh kesahkan terhadap pelayanan yang di berikan pemerintah tersebut. Kesimpulan nya dalam program KOTAKU ini dengan masalah pelayanan air minum/baku tersebut sudah berjalan namun belum optimal, berdasarkan di kaji dari aspek sosial, ekonomi, dan politik, masyarakat wilayah pesisir tersebut merasa pelayanan air dari pemerintah itu tidak dapat di gunakan untuk masyarakat bersekala besar, karena kapasitas air nya yang kecil, sehingga tidak bisa tercover untuk masyarakat tersebut.

f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan sejauh ini adalah sikap positif yang mendukung pelayanan air minum/baku di Kampung Bugis.

Dalam variabel disposisi yang berkaitan dengan respon implementor terhadap kebijakan, implementor sangat mendukung secara positif, adanya kebijakan pelayanan air minum/baku ini, karena program ini dapat mensejahterakan masyarakat hak katas air di kawasan permukiman kumuh perkotaan khususnya yang rawan air bersih, terutama daerah pesisir dalam indikator akses pelayanan air minum. Dengan adanya dukungan dari keseluruhan implementor kebijakan maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) pada pelayanan air minum/baku di Kelurahan Kampung Bugis di Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan bahwa implementasi pada pelayanan air minum/baku di kelurahan Kampung Bugis ini sudah berjalan, namun penerapan dalam pengoperasian nya tidak berjalan dengan yang semestinya, dalam hal tersebut terdapat kendala dalam penerapan nya yang ada di Kampung Bugis tersebut, ternyata SPAM yang ada di Kampung Bugis tidak dapat di pakai secara menyeluruh ke masyarakat,

1. Dari Standar dan sasaran kebijakan, sudah berjalan dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan sesuai dengan standar yang mengacu dengan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Dengan demikian Kesimpulan yang dapat di ambil dari program KOTAKU Di kelurahan Kampung Bugis khususnya pada masalah pelayanan air minum/baku dari indikator standar, dan sasaran kebijakan sebenarnya sudah berjalan, namun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampung Bugis tidak bisa beroperasi secara menyeluruh untuk masyarakat, karena debit air yang kecil. Jadi BLUD-UPTD SPAM Kota Tanjungpinang mengerahkan SPAM yang ada di Sungai Ladi untuk di pakai agar bisa melayani masyarakat yang memerlukan jasa layanan air minum/baku tersebut, namun ternyata terdapat permasalahan di dalam penggunaan layanan ini, pandangan dari masyarakat indikator sasaran dan kebijakan tersebut program ini sudah berjalan namun belum berjalan dengan baik, karena masih banyak permasalahan yang ada di lapangan khususnya masyarakat pesisir yang menggunakan pelayanan air minum/baku tersebut.
2. Dari Sumber daya dalam program KOTAKU khususnya masalah pelayanan air minum/baku di Kelurahan Kampung Bugis ini sudah cukup memadai, namun sumber daya manusia nya tidak saling berkoordinasi,hal ini karena dalam pembangunan sumur bor tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya, yaitu debit air yang kecil dan pengoperasian nya yang lama sehingga masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut tidak merasa puas dengan layanan yang di berikan.
3. Dari Hubungan Organisasi, dapat di simpulkan dalam hubungan antar organisasi dinas PUPR di bidang cipta karya, dan BLUD-UPTD SPAM Kota Tanjungpinang ini hubungan organisasi ysang di lakukan dalam pelayanan ini masih belum berjalan dengan baik, di karenaka koordinasi dalam pembangunan sumur bor tersebut tidak berjalan dengan yang semestinya, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan air minum/baku tersebut kini harus sulit untuk mendapatkan air minum/baku tersebut, khususnya yang ada di wilayah

pesisir. Jadi dalam hubungan antar organisasi terkait dengan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dengan masalah pelayanan air minum/baku tersebut hubungan komunikasi, dan koordinasi nya belum cukup baik.

4. Dari Karakteristik agen pelaksana program, kesimpulan bahwasan nya program KOTAKU ini di Kelurahan Kampung Bugis kawasan pesisir terkait dengan pelayanan air minum/baku tersebut belum dapat di katakan maksimal, karna dalam hal ini penerima manfaat, (masyarakat) menyampaikan opini yang berbeda dengan apa yang di sampaikan pihak instansi yang berkolaborasi tersebut, hal tersebut berbanding jauh dengan apa yang di rasakan masyarakat pesisir tersebut, mereka mengeluh kesahkan terkait dengan pelayanan air yang di berikan pemerintah tersebut. Program pelayanan air minum/baku ini sudah berjalan dengan semestinya, namun berdasarkan pelaksanaan di lingkungan masyarakat pelayanan ini justru menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Kampung Bugis RW 06, dan RW 01 kawasan pesisir tersebut, karena mereka mengeluh kesahkan masalah pelayanan air yang di berikan pemerintah tersebut.
5. Sosial, ekonomi, dan politik, dapat di simpulkan dalam program KOTAKU ini dengan masalah pelayanan air minum/baku tersebut sudah berjalan namun belum optimal, berdasarkan di kaji dari aspek soial,ekonomi, dan politik, masyarakat wilayah pesisir tersebut merasa pelayanan air dari pemerintah itu tidak dapat di gunakan untuk masyarakat bersekala besar, karena kapasitas air nya yang kecil, sehingga tidak bisa tercover untuk masyarakat tersebut.
6. Disposisi Implementor, karena disposisi implementor merupakan selaku instansi yang melakukan penerapan program, maka pemerintah daerah dalam hal ini mendukung program yang di tetapkan oleh pemerintah pusat ini, mereka mendukung secara positif program tersebut, karena program ini bertujuan mesejahterakan masyarakat yang sulit dengan kebutuhan air minum/baku yang berada di kawasan rawan air bersih, khususnya daerah pesisir.

V. Daftar Referensi

Buku :

- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik; Pendelegasian Tanggungjawa Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Abdul Jabar.(2010) *Evaluasi Program Pendidikan ;Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* . Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Sardjo, dkk. (2016). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Sosial (EFPPS); Partisipasi Multipihak Dalam Evaluasi Formatif Program*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obar Indonesia
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia Ratna.
- Zuriah, Nurul.(2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, (2005). *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.

Undang-Undang, dan Perwako :

- Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dalam pasal 346
- Surat Edaran dari Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
- Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 Tentang Tarif Jasa Layanan Air Minum Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.
- Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 44 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok, dan fungsi organisasi dan tata kerja dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang
- Peraturan Walikota (PERWAKO) No. 18 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas PUPR Kota Tanjungpinang.

Skripsi dan Jurnal

- Wita Dwi Anugrah Vlentine. (2018). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Pada Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun 2018)* Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun 2019. Kota Tanjungpinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
- Indah Fitri Maulana. (2018), *Evaluasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi*, Jurnal Vol 2, No 1, Juni 2016. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Nurhasanah. (2018). *Implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. Kota Malang: Universitas Islam Malang
- Septy Regawani (2017) *Implementasi retribusi parkir tepi jalan umum di kecamatan Bintang Timur kabupaten Bintang*. Skripsi jurusan ilmu pemerintahan Tahun 2018. kota Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Internet

- <http://eprints.umm.ac.id/36598/3/jiptummpp-gdl-pradiptasu-50916-3>(diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 17:35 WIB)
- <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-iraquraisy-26896-3-unikom> (diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 17:35 WIB)
- <https://digilib.uns.ac.id> commit to user (diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 23:15)

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Assist, Prof. Kustiawan, S.S.,M. sol.Sc. Selaku Pembimbing Utama penulis sekaligus penasehat akademik yang telah membimbing penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Assist, Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra,S.IP,M.A Selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing memberikan saran, masukan dan yang telah memberikan nasihat kepada penulis pada penelitian skripsi ini.
3. Dan Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fisip UMRAH beserta Staf yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya serta membantu penulis dalam menjalani studi hingga lulus;

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.